

Analisis Interaksi Ekonomi Nelayan dan Pembangunan *Center Point Of Indonesia* di Makassar

Juardi ¹✉, A. Bimontoro²

^{1,2} Ilmu ekonomi UIN alauddin Makassar, Indonesia

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan dibangunnya *Center Point of Indonesia*, terdapat perubahan dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari aspek ekonomi utamanya nelayan yang bermukim di daerah pesisir pantai yang terkena reklamasi mengalami penurunan pendapatan, hilangnya mata pencaharian sebagai masyarakat, Peralihan Profesi dari Nelayan disisi lain dari Pembangunan CPI bisa membangunkan Sektor bisnis, Parawisata, menarik Investir dan hiburan sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Dari sisi Lingkungan dari Pembangunan CPI, Ekosistem laut yang terganggu, hilangnya terumbu karang dan kawasan mangrove sebagai daerah tangkapan Nelayan sehingga mengakibatkan daerah tangkapan nelayan berpindah tempat dan semakin jauh. Dari sisi Sosial, masyarakat yang bermukim di daerah pesisir pantai banyak yang beralih profesi akibat mata pencaharian yang hilang demi menyambung Hidup, akibat dari pendapatan Nelayan yang semakin berkurang dengan biaya melaut semakin tinggi, ini berdampak pada menurunnya kualitas Hidup yang berujung pada Kesenjangan Ekonomi yang dekat dengan Jurang Kemiskinan dan Pengangguran.

Kata Kunci: *Ekonomi Nelayan, Pembangunan CPI*

Copyright (c) 2022 Adi Neka

✉ Corresponding author :

Email Address : juardi@uin-alauddin.ac.id

PENDAHULUAN

Sebagai kota metropolitan, Kota Makassar yang juga merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pusat kegiatan sosial ekonomi. Semua bentuk pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, semuanya berpusat di Kota Makassar. Tuntutan sebagai kota metropolitan memaksa Kota Makassar menggalakkan pembangunan. Menurut Mahi A.K, (2017) Pembangunan adalah upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (valid) bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik. Pembangunan dalam ruang perkotaan diharapkan berbasas pada teori Cost Analisis Bennefit sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dilakukan agar tercapai kepuasan maksimal terhadap manfaat pembangunan. Pada umumnya, aspirasi yang paling humanistik tersebut dinyatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat (society welfare). Banyak teori menyinggung kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama suatu pembangunan, tapi realitas yang terjadi adalah adanya ketimpangan kesejahteraan bagi masyarakat. Teori Myrdal mengenai dampak balik dan dampak sebar. Dia mendefinisikan dampak balik sebagai "Semua perubahan yang bersifat merugikan,

dari ekspansi ekonomi disuatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dampak sebar menunjuk pada dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya". Jhingan, (2008). Pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) di pesisir pantai Kota Makassar merupakan salah satu contoh dampak balik dalam teori Myrdal. Kawasan ini mulanya merupakan lokasi mata pencaharian masyarakat nelayan, yang kemudian direklamasi dan berlanjut ke pembangunan CPI. Konsep CPI ini sendiri adalah kota kawasan modern, Citra Land City Losari Makassar, yang terintegrasi dengan hunian dan pusat komersial. CPI akan dibangun di lahan seluas 157 ha, sekitar 50 hektar lahan reklamasi diserahkan ke Pemerintah Sulawesi Selatan. Lahan itu akan menjadi area publik guna pembangunan fasilitas umum, seperti masjid, wisma negara, taman, dan lain-lain. Selebihnya lahan diberikan kepada pihak swasta dalam mengelola daerah tersebut untuk mengembangkan kota baru dengan nama Citra Land City Losari untuk pemukiman dan area komersil. Dari pembagian lahan tersebut dapat kita ketahui bahwa hal tersebut akan menguntungkan pihak swasta karena pemerintah hanya mendapat 32% padahal lahan tersebut merupakan milik negara. Rilwanu, (2017). Keberadaan CPI sebagai wujud kota tepian air adalah bentuk realisasi visi Kota Makassar Tahun 2014-2019 yaitu menjadikan Kota Makassar sebagai kota dunia. Beberapa bentuk pembangunan digalakkan untuk mencapai hal tersebut. Padahal, esensi pembangunan adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Pembangunan mega proyek CPI Makassar memberikan dampak pada ekosistem laut, merusak sumber daya perikanan yang mengakibatkan terjadinya sedimentasi laut dan pencemaran laut. Secara otomatis para nelayan akan lebih sulit untuk mencari ikan. Pembangunan proyek CPI juga telah mengubah kualitas air laut yang dulunya bersih dan jernih kini tercemari oleh limbah yang berasal dari pembanguna CPI. Hal terebut dikonfirmasi oleh Dg Abbas yang pernah bekerja sebagai pencari kerang dan nelayan dengan mengatakan "Dulu terdapat banyak hasil laut yang saya dapatkan untuk dijual, tapi setelah ada CPI hasil lau menurun, untuk mendapatkan hasil laut yang banyak, saya harus mengeluarkan ongkos/biaya yang lebih besar, jadi sama saja". (Wawancara langsung pada tanggal 13 Oktober 2021). Dalam artikel yang diterbitkan RM.id, Amin memaparkan tentang dampak kerusakan yang dihadirkan pembangunan CPI dengan mengatakan " Hingga akhirnya terjadilah abrasi seperti saat ini, yang mengakibatkan 27 rumah mengalami kerusakan. Kemudian, akses nelayan ke pantai terganggu, juga kompleks pemakaman warga tergerus akibat abrasi. Pendapatan nelayan tradisional juga menurun sampai 80 persen akibat terganggunya ekosistem pantai karena pengerukan pasir laut demi proyek raksasa CPI". (<https://rm.id/kategori-berita/etalase-bisnis>). Pernyataan dari Amin memperkuat dampak ekonomi yang kurang baik akibat hadirnya pembangunan CPI. Sangat dibutuhkan konsep Cost Analisis Bennefit dalam menganalisa pembangunan yang dapat memberikan manfaat dengan meminimalisir kerugian yang hadir. Upaya untuk menggalakkan pembangunan oleh pengambil keputusan diharapkan tepat sasaran dengan mengguakan konsep Cost Analisis Bennefit. Apa yang disampaikan Dg Abbas dan Amin sebagai orang yang mengisahkan dampak langsung dari Pembangunan CPI Makassar terhadap kehidupannya mengonfirmasi bahwa Keberadaan CPI menjadikan masyarakat semakin sulit mengakses pendapatan sebagaimana sebelum didirikannya CPI Makassar. Terjadinya penurunan ekonomi yang merupakan dampak akan kehadiran CPI Makassar memperlihatkan bagaimana

konsep Cost Bennefit Analysis tidak dijadikan sebagai alat dalam merumuskan dampak pembangunan CPI Makassar. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Khair pada tahun 2019 yang memperlihatkan bagaimana penurunan pendapatan masyarakat nelayan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Para pencari kerang (tude) juga terkena dampak dari kerusakan ekosistem laut akibat dari pembangunan reklamasi ini, yang dulunya para pencari kerang dengan mudah mendapatkan kerang, dua sampai tiga jam mereka bisa mengumpulkan satu karung penuh, sekarang hanya ada satu tempat untuk mencari kerang itupun makin sedikit. Dulu ada enam jenis kerang, sekarang tinggal tiga salah satunya kerang hijau yang tidak terlalu diminati karena sempat beredar kabar kalau kerang hijau di losari tercemar dan beracun. Menurut Sumairah dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2020, dari total 62 responden yang secara keseluruhan berasal dari nelayan, Perubahan pendapatan adalah jumlah penghasilan rata-rata responden perbulannya baik sebelum dan sesudah reklamasi. Adanya pembangunan CPI berdampak terhadap penurunan jumlah rata-rata penghasilan yang diperoleh responden. Hal ini karena responden harus mengeluarkan biaya bahan bakar tambahan untuk melakukan pekerjaannya sebagai nelayan. Hal ini sesuai pendapat Budi Usman (2005) yang mengatakan bahwa salah satu dampak negatif karena kegiatan reklamasi pantai adalah terjadinya kerusakan ekosistem dan adanya ancaman kehilangan mata pencaharian untuk nelayan.

Proyek reklamasi ini juga menghilangkan kawasan serapan air karena menjadi jalan utama lintas metro tanjung bunga, yang merupakan akses menuju proyek reklamasi tersebut, sehingga pada saat musim hujan, banjir kerap kali terjadi. Pembangunan jalan ini juga menghilangkan terumbu karang dan kawasan mangrove, yang fungsi utamanya yaitu penyerap karbon lepasan kawasan industri khususnya di daerah perkotaan seperti Kota Makassar ini, yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati di perairan Makassar, sehingga akan berkontribusi meningkatkan efek global warming. Selain itu akibat dari proyek reklamasi ini juga menyisakan kawasan tempat pelelangan ikan di jalan Rajawali sebagai kubangan dan tempat bertumpuknya sedimentasi. Dermaga yang dulu berjejer perahu-perahu nelayan dari pagi hingga sore hari, sudah tidak nampak lagi. Dan sekarang kondisinya seperti kolam kecil dengan air berwarna hitam pekat.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah, ataupun buatan manusia fenomena itu dapat berupa bentuk, aktivitas karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar (kawasan pembangunan megaprojek reklamasi CPI Makassar). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari populasi, tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Sampel adalah sebagian anggota yang dipilih/diambil dari suatu populasi, besarnya sampel

ditentukan oleh banyaknya data atau observasi dalam sampel itu. (Hikmawati, 2017;60). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan di Kecamatan Mariso CPI kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cost Benenefit Analysis

1. Cost Benenefit Analysis

Cost benefit analysis adalah proses perhitungan agar dapat mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan dalam aktivitas ekonomi dan sebagainya. Dalam konteks pembangunan Center Point of Indonesia, analisis konflik adalah pendekatan yang digunakan dalam mengukur masalah sosial pembanguna CPI kota Makassar, yaitu melihat masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang berbeda yang berkompetisi untuk menguasai sumberdaya strategis, seperti kekuasaan, finansial, dan otoritas untuk memaksakan sebuah nilai pada masyarakat. Rekomendasi arah kebijakan yang dihasilkan difokuskan untuk kelompok sasaran penerima manfaat, yaitu masyarakat terdampak (nelayan, buruh angkut, petani tambak, penjual pisang epe, pelaku UMKM) dan para ibu rumah tangga yang juga terdampak dari pembangunan CPI. Adapun arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut:

- a) peningkatan pendapatan masyarakat terdampak;
- b) peningkatan kapasitas masyarakat terdampak;
- c) pemenuhan hak - hak dasar masyarakat terdampak;
- d) pemberdayaan masyarakat terdampak; dan
- e) penguatan jaringan industri kreatif rumahan.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup manusia tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam. Dalam aktivitas ini sering dilakukan perubahan-perubahan pada ekosistem dan sumberdaya alam. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya akan memberi pengaruh pada lingkungan hidup. Di daerah perkotaan persoalan lingkungan yang paling nampak adalah persoalan yang ditimbulkan oleh penggunaan lahan. Ada tiga penyebab utama antara lain; (1) faktor meningkatnya pertumbuhan penduduk baik secara alami (kelahiran) maupun perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi), (2) faktor pembangunan yang senantiasa mendominasi daerah perkotaan, (3) faktor keterbatasan lahan perkotaan.

Masalah penggunaan lahan di Kota Makassar juga mulai dirasakan, hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk setiap tahun terjadi peningkatan yang diiringi dengan perkembangan kegiatan usaha yang ada didalamnya. Seperti yang kita ketahui dampak dari kepadatan penduduk yang terus meningkat akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan dampak sosial yang berkelanjutan. Reklamasi pantai merupakan salah satu contoh dari upaya manusia untuk menjawab keterbatasan lahan di perkotaan, sebagaimana yang terjadi di Kota Makassar kegiatan reklamasi yang dilakukan adalah Pembangunan Center Point of Indonesia di Kawasan Pantai Losari. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034, ditetapkan kawasan Center Point of Indonesia (CPI) sebagai Pusat Global Bisnis Terpadu. Pembangunan Center Point Of Indonesia (CPI) dibangun di kawasan dengan luas total 600 hektar, terdiri dari pusat bisnis dan pemerintahan, kawasan liburan, hotel-hotel kelas dunia yang

dilengkapi dengan lapangan golf dengan view ke laut lepas dan pemandangan ke pulau di Teluk Makassar.

Dalam perkembangan selanjutnya kawasan tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas perkotaan dan permukiman. Proses reklamasi pantai pada kenyataannya belum berjalan dengan baik sehingga dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif seperti semakin banyaknya material yang hanyut, sehingga terjadi pendangkalan perairan, dan bila ini terus berlangsung akan mengancam ekosistem pantai. Hal lain yang terjadi akibat hadirnya CPI kota Makassar juga memberikan dampak yang negatif pada kelestarian laut. Menurut penelitian Citra pada tahun 2020, Proyek reklamasi ini juga menghilangkan kawasan serapan air karena menjadi jalan utama lintas metro tanjung bunga, yang merupakan akses menuju proyek reklamasi tersebut, sehingga pada saat musim hujan, banjir kerap kali terjadi. Pembangunan jalan ini juga menghilangkan terumbu karang dan kawasan mangrove, yang fungsi utamanya yaitu penyerap karbon lepasan kawasan industri khususnya di daerah perkotaan seperti Kota Makassar ini, yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati di perairan Makassar, sehingga akan berkontribusi meningkatkan efek *global warming*. Selain itu akibat dari proyek reklamasi ini juga menyisakan kawasan tempat pelelangan ikan di jalan Rajawali sebagai kubangan dan tempat bertumpuknya sedimentasi. Dermaga yang dulu berjejer perahu-perahu nelayan dari pagi hingga sore hari, sudah tidak nampak lagi. Dan sekarang kondisinya seperti kolam kecil dengan air berwarna hitam pekat. (Citra:2020)

Resiko ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan kesimpulan bahwa reklamasi di Kawasan Pantai Losari menimbulkan dampak pencemaran yang disebabkan oleh sampah yang dibuang di sembarang tempat dan yang melakukan hal tersebut tidak lain adalah para pengunjung dan para pedagang serta karena limbah dari perhotelan, perumahan hingga dampak dari reklamasi CPI (Fuadi, 2021). Dengan mengetahui dampak lingkungan yang terjadi pasca reklamasi, maka dalam penelitian ini akan mengambil fokus dampak sosial yang terjadi akibat pembangunan CPI.

2. Pendekatan Analisis Masalah Soisal

Pendekatan Analisis Masalah Sosial Pendekatan analisis dalam masalah sosial pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) yang dilakukan melalui reklamasi Pantai Teluk Makassar menggunakan pendekatan analisis konflik karena masyarakat terdiri atas berbagai kelompok yang berbeda yang berkompetisi untuk menguasai sumberdaya strategis, seperti kekuasaan, finansial, dan otoritas untuk memaksakan sebuah nilai pada masyarakat. Konflik merupakan sesuatu yang melekat dalam kehidupan manusia, ketika berinteraksi, berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak dalam berbagai kondisi dan peristiwa.

Analisis konflik dalam konteks pembangunan merupakan suatu alat yang digunakan untuk menelaah, menemukan dan memformulasikan kondisi masyarakat secara komprehensif dalam kerangka program pembangunan mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Dari hasil wawancara dengan Dg Nawa (50 tahun) saat ditanyakan dampak yang dirasakan atas kehadiran CPI kota Makassar mengatakan bahwa tidak ada dampak positif yang didapatkan sebagai nelayan atas kehadiran CPI kota Makassar. Dg Nawa menyatakan bahwa :

“ tidak ada dampaknya yang menuntungkan untuk saya ini pembangunan”. (Dg. Nawa:10 Juli 2022).

Dg. Nawa menyimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa tidak ada dampak positif yang mengarah pada kesejahteraan nelayan atas hadirnya CPI di Kota Makassar.

Sedangkan dari penelitian Walhi pada bulan Maret tahun 2021 yang berjudul **“Reklamasi Makassar New Port Menyengsarakan Masyarakat Nelayan Kodingareng”** melalui Direktur Walhi Sules Muhammad Al Amin menyatakan bahwa *“Sejak Agustus hingga Desember 2020, kami melakukan riset di Pulau Kodingareng, dimana hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan penambangan pasir laut telah merusak ekosistem laut yang berakibat pada menurunnya hasil tangkapan nelayan. Bahkan hingga saat ini nelayan dan keluarganya mengalami krisis keuangan tidak mampu membeli kebutuhan pokok,”* jelas Muhammad Al Amin, Direktur WALHI Sulawesi Selatan”.

Pendekatan Analisis Konflik Permasalahan Sosial Masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan, buruh angkut, petani tambak, penjual pisang epe, pelaku UMKM di wilayah Pantai Losari mengalami pengurangan pendapatan penghasilan. Perubahan Sosial Dampak dari CPI bisa menghilangkan pekerjaan masyarakat pesisir yang berakibat pada mata pencaharian yang berkurang dan keterpenuhan hak-hak dasar mereka yang sulit terpenuhi. Individu Masyarakat tidak memiliki pekerjaan akibat dari pembangunan CPI yang berdampak pada kemiskinan dan pengangguran untuk masyarakat yang terdampak.

Masyarakat Semakin menambah kesenjangan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Attahmid (2018) dengan mengidentifikasi lima faktor perubahan masyarakat pesisir sebagai dampak pembangun CPI Makassar. Pertama, masyarakat pesisir mengalami perubahan dalam hal penurunan perolehan hasil-hasil laut yang disebabkan oleh lahan penangkapan ikan dan kerang- kerang yang ada menjadi kurang produktif sehingga sulit untuk mendapatkan hasil laut seperti dahulu lagi. Kedua, Masyarakat pesisir mengalami perubahan penurunan dalam penghasilan yang disebabkan oleh adanya penurunan hasil laut yang diperoleh sehingga masyarakat pesisir harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapat ikan dan hasil-hasil laut lainnya. Ketiga, masyarakat pesisir mengalami perubahan dalam hal status pekerjaan yang beralih profesi ke pekerjaan lain yang bukan nelayan yang disebabkan oleh penurunan jumlah penghasilan dari pekerjaan sebagai nelayan sehingga masyarakat pesisir memilih untuk mencari pekerjaan lain. Keempat, masyarakat pesisir mengalami perpindahan wilayah penangkapan hasil laut karena sulitnya mendapatkan hasil laut karena wilayah yang dahulu kini menjadi lahan yang ditimbuni untuk pembangunan CPI. Kelima, masyarakat pesisir yang memiliki usia yang tua, tidak memiliki modal dan latar belakang pendidikan yang rendah menyebabkan beberapa masyarakat pesisir tetap bertahan sebagai nelayan.

3. Dampak Positif Pembangunan CPI Kota Makassar

Pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Makassar dan Sulawesi Selatan. Pembangunan inipun diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara Wilayah

Barat Indonesia (WBI) dan Wilayah Timur Indonesia (WTI) dimana per Triwulan II 2021 kontribusi PDB Nasional masih didominasi Pulau Jawa sebesar 57,92% dan Pulau Sumatera sebesar 21,73% (BPS, 2021). Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diwujudkan di antaranya dengan berbagai potensi ekonomi yang akan dihasilkan, yaitu sebagai berikut :

1. Berkembangnya Sektor Bisnis dan Hiburan

Kehadiran proyek Center Point of Indonesia (CPI) dibangun dengan berbagai fasilitas, dimana persentase paling besar adalah pusat bisnis seluas 32,9 ha (21%) dan berbagai pusat hiburan. Adanya pusat bisnis dan pusat hiburan baru ini tentu akan membuat perputaran uang semakin tinggi yang akan memberikan multiplier effect besar dalam roda perekonomian. Adapun lapangan usaha yang akan paling terdampak diperkirakan adalah sektor tersier, meliputi perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, dan jasa perusahaan. Dengan hadirnya beberapa fasilitas dari pembangunan CPI Kota Makassar memberikan perkembangan terhadap sektor bisnis dan hiburan. Hal tersebut dijelaskan dalam penelitian Hasani. (2015) berjudul "Kajian Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Reklamasi Pantai untuk Kawasan Ruang Publik". Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dampak sosial ekonomi dari adanya reklamasi pantai yaitu terakomodasinya kebutuhan warga akan adanya tempat interaksi dan sosialisasi sekaligus sebagai tempat berdagang ataupun berjualan sehingga memberi peluang pekerjaan bagi warga.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan PAD (Kab/Kota di Metropolitan Mamminasata dan Provinsi Sulawesi Selatan) disebabkan adanya sumber pajak dan retribusi baru dari berbagai kegiatan ekonomi di Center Point of Indonesia (CPI) dan kawasan sekitarnya. Peningkatan PAD ini kemudian akan meningkatkan indeks kapasitas fiskal daerah, sehingga daerah akan semakin mandiri dalam melaksanakan pembangunannya. Berkurangnya proporsi APBN dalam pembangunan di wilayah Makassar dan sekitarnya akan berdampak luas karena APBN menjadi dapat lebih banyak digunakan di wilayah lainnya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Sumber pajak yang dihadirkan melalui aktifitas ekonomi setelah hadirnya ekonomi memberi dampak terhadap peningkatan PAD. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iktifa Rahmi Umamit, (2012) berjudul "Dampak Reklamasi Pantai di Kawasan Tanjung Bunga Terhadap Masyarakat Nelayan di Kecamatan Mariso Kota Makassar". Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut adalah secara sosial ekonomi kehadiran CPI Kota Makassar dapat meningkatkan pendapatan daerah.

3. Bertambahnya Lapangan Kerja

Lapangan kerja dapat meningkat saat pelaksanaan pembangunan maupun setelah pembangunan selesai. Saat pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja konstruksi. Tenaga kerja konstruksi yang tidak memerlukan keahlian khusus sebaiknya diambil dari penduduk

lokal yang usahanya terganggu oleh pembangunan (nelayan, petani tambak, buruh, dsb). Setelah pembangunan selesai, tenaga kerja yang diperlukan akan lebih beragam, terutama terkait sektor perdagangan dan jasa. Masyarakat terdampak yang dipekerjakan sebagai tenaga konstruksi saat pembangunan CPI harus tetap dapat diakomodir setelah CPI beroperasi. Oleh sebab itu, selain pelatihan konstruksi, diperlukan juga pelatihan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan sektor ekonomi yang berkembang di CPI. Hadirnya pengembangan pantai dalam hal ini CPI akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar berupa perdagangan dan jasa. Hal tersebut dijelaskan juga dari penelitian Hasani. (2015) berjudul "Kajian Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Reklamasi Pantai untuk Kawasan Ruang Publik". Penelitian tersebut menarik kesimpulan bahwa dampak ekonomi dari pengembangan reklamasi pantai untuk ruang publik : meningkatkan aktivitas ekonomi warga setempat dengan munculnya tempat untuk berdagang makanan dan berjualan sehingga memunculkan lapangan kerja untuk warga.

4. Peningkatan Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata akan turut berkembang dengan adanya Center Point of Indonesia (CPI), khususnya wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Berkembangnya wisata MICE akan memberikan multiplier effect besar karena semakin banyaknya uang yang dibelanjakan oleh wisatawan akan mendorong peningkatan berbagai sektor produksi. Dalam rangka mengoptimalkan potensi ini, diharapkan ada kebijakan yang mendukung masyarakat agar dapat mengembangkan kegiatan usaha pendukung pariwisata.

5. Berkurangnya Risiko Tsunami

Pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) dapat berfungsi sebagai peredam tsunami. Hal ini karena proses reklamasi Teluk Makassar disertai dengan pemasangan front break water, sehingga akan meminimalkan kerusakan jika terjadi tsunami. Front break water bekerja dengan melemahkan kekuatan gelombang yang datang. Dengan demikian, risiko tsunami dapat berkurang sehingga Kota Makassar dapat menjadi tempat yang lebih aman dalam berkegiatan, terutama untuk pengembangan ekonomi. Dari hasil penelitian Alatas (2017) berjudul "Dampak Reklamasi Lahan Pesisir Kawasan Center Point of Indonesia Kota Makassar terhadap Pendapatan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Mariso Kota Makassar". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Tujuan dilakukannya reklamasi yaitu untuk penataan kembali pantai dari pencemaran berbagai limbah, ataupun sampah buangan dan juga sebagai bentuk mitigasi bencana sedimentasi akibat longsor gunung bawakaraeng yang terbawa ke arus sungai jeneberang ke pantai.

6. Menarik Investor

Multiplier effect pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) mengakibatkan peningkatan produksi di berbagai sektor ekonomi. Peningkatan tersebut merupakan bentuk pemenuhan demand yang muncul. Hal ini tentu merupakan peluang besar, terutama jika sisi supply belum mampu memenuhi peningkatan kebutuhan baik selama proses

pembangunan maupun setelah CPI beroperasi. Urbanisasi pun akan semakin cepat dan semakin meluas. Urbanisasi terjadi akibat fungsi CPI yang memperkuat pull factor Kota Makassar. Hal ini tentu akan menarik beragam investasi untuk masuk, mengingat adanya hubungan positif antara urbanisasi dengan peningkatan demand. Pembangunan CPI yang berdampak investasi dijelaskan dari hasil penelitian Suhairah, (2020) berjudul "Dampak Pembangunan Center Point Of Indonesia Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan Panambungan". Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Investasi tertarik di daerah tersebut untuk memanfaatkan sumber daya yang dimaksud, yang lama-kelamaan daerah tersebut menjadi daerah pusat produksi yang menciptakan *external economies* (penghematan *extern*).

4. Dampak Negatif Pembangunan CPI Kota Makassar

Dampak negatif pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) berdasarkan aspek sosial dan perspektif ekonomi secara umum adalah menurunnya tingkat perekonomian masyarakat di sekitar kawasan pembangunan (kawasan pesisir) akibat mata pencahariannya terganggu oleh aktivitas pembangunan. Akibatnya, mereka semakin terperangkap dalam kelas sosial yang rendah. Secara lebih rinci, dampak negatif pembangunan CPI adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) terlihat ketika masyarakat berpenghasilan menengah ke atas sebagai sasaran utama pembangunan CPI akan dapat mengakses berbagai fasilitas di dalamnya, tetapi masyarakat sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani tambak akan kesulitan mengaksesnya. Kesenjangan terjadi antara pelaku sektor jasa perdagangan yang akan semakin berkembang dengan profesi nelayan dan petani tambak yang justru tertekan dengan adanya CPI. Tertekannya profesi nelayan dan petani tambak karena adanya perubahan ekosistem pesisir seperti lokasi tangkapan ikan akan semakin jauh, adanya risiko pencemaran air, dsb. Meningkatnya kesenjangan ini membuat risiko konflik sosial semakin tinggi. Peningkatan kesenjangan ekonomi diakibatkan oleh hadirnya kelompok yang semakin diuntungkan atau diperkaya dan disaat bersamaan menghadirkan kelompok yang terpinggirkan dalam hal ini kehilangan mata pencaharian. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan Saddam (2018) berjudul "Reklamasi Pantai Losari dalam Mempengaruhi Sosial Ekonomi dari Sudut Pandang Sustainable Development". Penelitian tersebut menarik kesimpulan bahwa reklamasi hanya bisa dinikmati oleh para investor atak kalangan yang memiliki modal saja, sedangkan masyarakat sekitar utamanya nelayan yang terkena dampak negatif dari pembangunan reklamasi tersebut.

2. Tertekannya Profesi Nelayan

Meningkatnya pencemaran pantai pada saat pembangunan ataupun ketika Center Point of Indonesia (CPI) beroperasi akan menurunkan hasil laut. Masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapat ikan dan hasil-hasil laut lainnya. Hal ini karena alur tangkap ikan berpindah menjadi lebih jauh. Akibat pembanguna CPI dapat memberi berdampak negatif terhadap stabilitas

ekonomi nelayan. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Iktifa (2012) berjudul “Dampak Reklamasi Pantai di Kawasan Tanjung Bunga Terhadap Masyarakat Nelayan di Kecamatan Mariso Kota Makassar”. Penelitian tersebut mengambil kesimpulan bahwa secara sosial ekonomi hadirnya CPI kota Makassar menjadi ancaman hilangnya mata pencaharian nelayan karena berkurang hasil penangkapan baik kerang maupun ikan.

3. Menurunnya Kualitas Hidup (Sandang, Pangan, Papan) Nelayan
Penurunan kualitas hidup nelayan merupakan dampak sosial lanjutan dari menurunnya tingkat perekonomian mereka. Nelayan akan semakin sulit mengakses kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Jika kondisi ini dibiarkan maka kesenjangan akan semakin meningkat dan dapat berujung pada konflik sosial. Oleh sebab itu, pemerintah perlu membuat kebijakan dalam hal ini kompensasi untuk para nelayan terdampak. Penurunan kualitas hidup diakibatkan karena tingkat kesejahteraan yang juga mengalami penurunan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam penelitian Aswandi (2019) berjudul “Analisis Pembangunan Perkotaan dalam Perspektif Green Economy (Studi Kasus: Mega Proyek Reklamasi CPI Makassar)”. Penelitian tersebut menarik kesimpulan bahwa Berdasarkan dari hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan proyek reklamasi tidak tepat dilakukan, karena sangat banyak dampak yang diberikan khususnya masyarakat yang berada di sekitaran proyek reklamasi. Dampak sosial, ekonomi, lingkungan atupun penurunan kesejahteraan yang terjadi.

5. Prospek Layanan Publik Hadirnya CPI Kota Makassar

Layanan publik yang perlu dikembangkan dalam mendukung Center Point of Indonesia (CPI) dari perspektif ekonomi meliputi: 1) Tersedianya ruang yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas perekonomian, khususnya untuk membangun kawasan strategi bisnis global; 2) Penyediaan sarana prasarana bagi pelaku usaha untuk pemasaran produk; dan 3) Kemudahan izin usaha untuk investor. Layanan publik tersebut dirumuskan untuk mengoptimalkan dampak positif yang akan dihasilkan dari pembangunan CPI. Layanan publik tersebut selain mendukung investor juga perlu mendukung pengembangan masyarakat lokal. Pelaku usaha perlu diarahkan untuk melibatkan masyarakat sekitar dalam menjalankan bisnisnya. Adaun untuk prospek layanan publik yang diharapkan masyarakat terdampak setelah pembangunan CPI kota Makassar dapat dilihat pada penelitian penelitian Faisal dan Khairil (2019) berjudul “Silang Sengkarut Pembangunan Berkelanjutan Perkotaan Dalam Pusaran Kapital (Studi Kasus : Megaprojek Reklamasi CPI Makassar) menjelaskan bahwa Masyarakat juga menginginkan, agar bisa dipekerjakan disana, sesuai dengan janji dari pihak pengembang dan pemerintah. Agar mereka memperoleh pekerjaan yang layak. Dan adapun dari pihak korban penggusuran akibat pembangunan proyek reklamasi tersebut, menginginkan diberikan tempat tinggal yang layak, bukan diterlantarkan begitu saja.

6. Kompensasi Sosial

Berdasarkan Keputusan Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau – Pulau Kecil No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Relokasi dan Kompensasi Kegiatan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, kompensasi adalah penggantian yang diberikan atas tanah, bangunan, dan usaha yang dibebaskan, secara

keseluruhan atau sebagian dan semua aset/benda yang tidak bergerak di atas tanah dan bangunan-bangunan tersebut seperti tanaman dan pohon serta aset non-fisik (kesempatan yang hilang akibat dampak reklamasi) seperti hilangnya kesempatan berusaha, dan menurunnya tingkat pendapatan. Bentuk kompensasi dapat berupa ganti kerugian tunai maupun non tunai. Pada subbab ini, kompensasi yang akan didalami lebih lanjut adalah kompensasi dalam rangka pemulihan pendapatan masyarakat terdampak dalam bentuk non tunai. Tujuan utama pemberian kompensasi adalah untuk menghindari konflik sosial akibat adanya kerugian yang diterima masyarakat yang tidak disepakati penyelesaiannya.

Oleh sebab itu, selaras dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari Center Point of Indonesia (CPI) terhadap masyarakat sekitar, bentuk kompensasi yang diperlukan adalah terkait upaya menjaga bahkan meningkatkan perekonomian masyarakat terdampak baik saat pelaksanaan pembangunan maupun saat CPI sudah beroperasi. Bentuk kompensasi dimaksud antara lain: 1) pelatihan keterampilan; 2) pemberian bantuan modal untuk membuka usaha; 3) penyediaan lapangan pekerjaan di CPI bagi masyarakat terdampak; 4) pemenuhan hak - hak dasar (sandang, pangan, papan); dan 5) penyediaan sarana prasarana industri kreatif rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian Faisal dan Khairil (2019) berjudul "Silang Sengkarut Pembangunan Berkelanjutan Perkotaan Dalam Pusaran Kapital (Studi Kasus : Megaproyek Reklamasi CPI Makassar) menjelaskan bahwa masyarakat amat sangat membutuhkan yang namanya kompensasi baik dari pihak pemerintah, ataupun dari pihak pengembang dalam hal ini pihak swasta. Kompensasi yang dimaksud, apakah itu dalam bentuk uang tunai, untuk modal usaha, ataukah bantuan berupa perahu, atau mesin yang lebih besar, karena selama proyek ini dibangun, mereka tidak bisa lagi mencari ikan dipinggiran, karena perairan dipinggiran sudah sangat tercemar, sehingga ikan lari ketengah laut, oleh karena itu mereka juga harus ketengah laut untuk mencari hasil tangkapan, belum lagi kalau cuaca buruk, sedangkan perahu mereka kecil.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa selama proyek pembanguana CPI di kota Makassar berjalan, kompensasi sosial bagi masyarakat terdampak khususnya Nelayan hingga penelitian ini diterbitkan belum mendapatkan kompensasi sosial.

Pendapatan

1. Teori Pendapatan

Menurut Alfred Marshall (1879) yang merupakan seorang pemikir ekonomi klasik, ia berpendapat bahwa pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu Negara yang mengelola sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah "neto" komoditi baik itu material maupun imaterial seperti jasa dan sejenisnya. Hal ini berarti pendapatan nasional didapatkan sebagai hasil dari tenaga kerja dan modal yang ditanamkan oleh pengusaha pada kekayaan alam suatu Negara.

Alfred Marshall disini menggunakan istilah "neto" komoditi dikarenakan pendapatan bukan semua yang diproduksi tetapi harus disimpan untuk produksi tahun berikutnya. Beberapa pendapatan harus dikurangkan dari total depresiasi, mesin produksi dalam menghitung pendapatan tahunan dan semua kerugian dalam perdagangan internasional, dimana definisi ini hanya memberikan tekanan pada produk barang dan jasa, dengan mengabaikan pertukaran dan konsumsi yang penting

dalam ekonomi. Hal ini terjadi karena apabila yang di produksi tidak saling di pertukarkan dan di konsumsi, maka pendapatan tidak bermakna secara signifikan bagi masyarakat suatu Negara.

2. Pendapatan Nelayan Sebelum Pembangunan CPI Kota Makassar

Kelompok yang paling terkena dampak atas pembangunan CPI Kota Makassar adalah masyarakat pesisir Makassar, dalam hal ini mereka yang berprofesi sebagai Nelayan. Pergeseran dan perubahan sedimen pada laut berpengaruh pada ekosistem didalamnya, yang merupakan palang utama kehidupan mereka, Kondisi ini hampir serupa dengan petani yang kehilangan sawahnya.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai nelayan, tentu akan sangat bergantung pada kondisi laut, baik dalam segi ekologi. Pembangunan CPI Kota Makassar menjadi pukulan telak bagi masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai Nelayan. Salah seorang Informan yang bernama Dg. Rowa (umur) menekankan perbedaan kondisi pendapatannya sebelum kehadiran CPI kota Makassar. Dalam Penjelasan Dg. Rowa (47) mengatakan bahwa :

“dulu waktu masih sering melaut, masih bisaja penuhi kebutuhan rumah. Ini sekarang karena ditimbunki laut, tambah jauhki pergi cari ikan, banyak ongkos bahan bakar keluar” (Dg. Rowa, 10 Juli 2022)

Pernyataan tersebut sedikit banyaknya adalah gambaran kondisi keluarga nelayan saat ini, pasca reklamasi pantai Losari. Kondisi yang memaksa keluarga nelayan mesti berpikir ekstra bagaimana mereka akan keluar dari jurang kemiskinan, kondisi ini memaksa semua anggota keluarga untuk mengambil langkah demi menyelamatkan ekonomi keluarga, mereka semua mesti menghasilkan uang.

Selain Dg Rowa, dg Tata yang merupakan salah satu informan juga terkena dampak langsung dari pembangunan CPI Makassar. sebelum CPI Makassar dibangun, dg Tata yang juga merupakan ketua nelayan dipesisir Makassar tersebut adalah seorang pemilik warung makan sederhana yang juga menjadi tempat pembakaran ikan bagi para Nelayan. Sebelum hadirnya proyek CPI Makassar dg Tata seriap harinya rutin untuk mencari ikan, dan istrinya setiap hari menjaga warung yang banyak dikunjungi nelayan sebagai tempat makan dan beristirahat setelah melaut, namun keberadaan CPI Kota Makassar telah merubah kondisi pendapatan Dg tata dan istrinya menjadi lenih buruk. Dg tata (45 tahun) menyatakan bahwa :

“Dulu itu lumayan skali saya dapat, dari hasil nelayan ditambah lagi dari warung makanku yang rame sekali tiap hari., kurang sekalimi nelayan singgah sini bawa ikannya untuk dibakarkan ka jarang sekalimi turun cari ikan, walaupun ada nadapat paling nabawa pulangki dirumahnya kalau 2 atau 3 ekorji nadapat. Kah dulu disini tempatna nelayan kaya kumpul-kumpul kalau siang, singgah sini makan siang”.(Dg tata, 10 Juli 2022)

Berdasarkan dari apa yang diungkapkan informan di atas ini menjelaskan bahwa nelayan sangat terkena dampak dari reklamasi CPI Makassar, Dg tata dan Dg Rowa yang berprofesi sebagai nelayan sangat merasakan dampak akibat dari pembangunan reklamasi tersebut. Dg. Rowa juga menyatakan bahwa:

“ Sebelum ada ini penimbunan paling sedikit biasanya didapat itu 150, kadang dapat banyak itu 360 ribu. Sekara susahmi, banyakmi juga yang berhenti melaut gara-gara ini CPI”.(Dg. Rowa:10 Juli 2020).

Dari apa yang disampaikan Dg Rowa dapat dilihat bahwa nelayan yang dulunya bisa menghasilkan pendapatan sebesar 150.000 bahkan sampai 360.000 rupiah perhari itu kini sudah semakin sulit, dikarenakan para nelayan sudah tidak sesering dulu melaut, saat ini nelayan yang turun melaut pun hanya beberapa orang dan hanya bisa mendapatkan ikan tiga atau empat ekor saja, sangat tidak mungkin jika ingin dijual, mereka lebih memilih membawa hasil tangkapannya itu pulang ke rumah untuk dikonsumsi. Warung yang dimiliki Dg. Tata dan istri juga menjadi tempat para nelayan untuk singgah beristirahat sambil makan siang. Kini warung itu hanya bisa mendapatkan sekitar 50.000, itupun tidak setiap hari.

Nelayan yang merupakan kelompok yang paling terdampak akan kehadiran CPI kota Makassar perlu dilihat dalam sisi ekonominya. Dalam melihat kondisi perekonomian nelayan akan keberadaan CPI kota Makassar, dapat dilihat dari seberapa besar pendapatan nelayan CPI kota Makassar. Adapun pendapatan Nelayan sebelum kehadiran CPI Kota Makassar berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Informan	Pendapatan Sebelum Hadir	Profesi
1	Dg. Rowa	150-360 rb	Nelayan
2	Dg. Nawa	200-300 rb	Nelayan
3	Dg. Ngenta	200-300 rb	Nelayan
4	Dg. Tata	150-240 rb	Nelayan
5	Pak Arjun	180- 320 rb	Nelayan
6	Dg. Gassing	200-290 rb	Nelayan
7	Pak Anwar	190-250 rb	Nelayan
8	Dg Nua	160-200 rb	Nelayan

Sumber : Hasil Wawancara 10 Juli 2022

Secara otomatis dampak ekonomi yang dirasakan informan lebih berat dikarenakan nelayan kini sudah tidak memiliki pendapatan yang tetap dan juga yang dulu bisa membantu menghasilkan pendapatan yang bisa dibbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, kini mulai sepi dikarenakan para nelayan sudah tidak sesering dulu untuk turun melaut akibat dari pembangunan reklamasi CPI yang membuat nelayan sulit untuk mendapatkan ikan dikarenakan jarak tempuh yang semakin jauh, harga bahan bakar yang kian mahal, berbanding terbalik dengan pendapatan yang semakin menurun.

3. Pendapatan Nelayan Setelah Hadirnya CPI Kota Makassar

Ketika seorang nelayan tak lagi melaut atau tak dapat lagi menangkap ikan, maka ia tak lagi menghasilkan uang, sedangkan hidup mesti terus berlanjut, keluarganya butuh beras, anaknya harus bersekolah, dan berbagai kebutuhan lain akan dating. Keluarga dengan adanya pembangunan reklamasi CPI Makassar

membuat para nelayan tidak sesering dulu turun melaut, dan kini waktunya lebih banyak dihabiskan di rumah.

Kondisi nelayan yang dulunya bekerja setiap pagi hingga sore kini telah berubah, Ruang penghidupan mereka yang sangat bergantung dan berkaitan erat dengan kondisi alam pesisir. Pendapatan Nelayan mengalami penurunan yang sangat drastis akibat pembangunan CPI Kota Makassar. Hal ini disebabkan karena rusaknya ekosistem laut akibat dari pembangunan reklamasi CPI yang mengakibatkan semakin jauhnya jarak tempuh nelayan mencari ikan sehingga para nelayan harus ke tengah laut untuk mencari ikan. Hal tersebut tentu mempengaruhi pendapatan nelayan yang menurun secara drasris setelah hadirnya CPI Kota Makassar. Seperti yang dikemukakan Dg Ngenta (41 tahun) yang mengatakan bahwa :

“setelah ada ini pembangunan CPI, turun sekali pendapatan, bahkan kadang melautki itu tdak cukup sepuluh ekor didapat. Dulu itu paling tinggi bisa dapat 200 sampai 300 ribu, tapi karena biaya melaut semakin banyak ditambah ikan tambah susah, sekarang biasanya dapat sekitar 100 ribu”. (Dg Ngenta, 10 Juli 2022).

Dari hasil wawancara bersama Dg Ngenta dapat dilihat bahwa pendapatan nelayan mengalami penurunan yang drastis, penyebabnya adalah biaya melaut yang semakin tinggi. Hal yang ingin dijelaskan informan diatas adalah bagaimana setelah berlangsungnya pembangunan CPI kota Makassar, nelayan harus mengeluarkan ongkos melaut yang lebih banyak, sehingga mempengaruhi besarnya pendapatan bersih atau keuntunga yang didapatkan setelah melaut.

Penuturan Dg Ngenta tentang pendapatannya sebagai nelayan setelah hadirnya CPI kota Makassar kemudian diperkuat oleh Dg Gassing. Dg Gassing (48 tahun) sendiri menyampaikan Bahwa :

“Dulu sebelum ada ini proyek, biasanya dapatka 200an, sekarang tidak pernah sampai 100, tambah jauh ikan ketengah laut jadi banyak juga pengeluaran kalau mau pergi melaut”. (Dg Gassing, 10 Juli 2022).

Selaras dengan yang disampaikan Dg. Ngenta, Dg. Gassing juga mengeluhkan hal yang sama, diaman pengeluaran saat ingin pergi melaut semakin banyak. Atas dasar tersebut, dapat dilihat bahwa hadirnya pembangunan CPI kota Makassar berpengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi nelayan.

Sebagai perbandingan, untuk melihat pendapatan nelayan mengalami peningkatan atau penurunan sebelum dan setelah hadirnya CPI Kota Makassar dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2

No	Nama Informan	Pendapatan Setelah Hadir	CPI	Profesi
1	Dg. Rowa	50-110 rb		Nelayan
2	Dg. Nawa	75-130 rb		Nelayan

3	Dg. Ngenta	90-125 rb	Nelayan
4	Dg. Tata	80-100 rb	Nelayan
5	Pak Arjun	110- 135 rb	Nelayan
6	Dg. Gassing	70-115 rb	Nelayan
7	Pak Anwar	80-120 rb	Nelayan
8	Dg. Nua	90-135 rb	Nelayan

Sumber : Hasil Wawancara 10 Juli 2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan tabel 1.4 dan 1.5 kita melihat ada penurunan pendapatan yang signifikan yang dialami nelayan setelah hadirnya proyek CPI Kota Makassar. Hasil wawancara dengan Dg ngentang selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan Citra pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa hadirnya CPI di kota Makassar membuat pekerjaan mereka semakin sulit untuk dijalani, sehingga mengakibatkan ekonomi masyarakat menurun drastis malah biaya melaut mereka yang semakin meningkat. (Citra:2020). Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan Pendapatan akibat hadirnya CPI di kota Makassar.

A. Dampak Pembangunan CPI Terhadap Lingkungan Sekitar

1. Dampak Lingkungan dari pembanguan CPI Kota Makassar

Teori "*Human Capital*" dalam (Nurkholis 2016), menyatakan adanya hubungan erat antara pembangunan dan manusia, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis pembangunan dilakukan oleh pemerintah seharusnya adalah demi kepentingan umum, serta memperhatikan dampak langsungnya, baik terhadap alam ataupun manusia di sekitarnya, namun jika melihat pembangunan mewah mega proyek CPI Makassar, yang selain peruntukannya adalah kepentingan bisnis, proyek ini sendiri dinilai lalai terhadap dampak ekologis yang akan timbul di pesisir Makassar, hal ini dibuktikan dengan massifnya penolakan yang dilakukan organisasi lingkungan hidup, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel. Tambang pasir dan reklamasi yang terjadi di pesisir dan laut Sulawesi selatan, ujar staf advokasi Walhi Sulsel, Riski SAputra (Makassar Insight, 2020). Reklamasi yang sudah barang tentu merusak lingkungan kemudian menimbulkan efek domino. Efek domino dapat dilihat ketika dampak sosial dari pembangunan reklamasi dirasakan oleh masyarakat sekitar pesisir. Selain karena kerusakan daerah pesisir yang telah menghilangkan daerah hasil tangkapan nelayan, kajian Walhi Sulsel mendapati terdapat sekurangnya 3000 kapal dan perahu nelayan yang terdampak dan terancam dengan adanya kegiatan reklamasi mega proyek CPI, terdampaknya mereka ini berasal dari daerah kecamatan Marisodimana mereka kesulitan dalam mencari ikan serta jalur transportasi perahu mereka yang juga semakin menyempit seiring pelaksanaan Mega Proyek CPI (Aspan:2017).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamaruddin, Hafied, dan Muh. Akbar pada tahun 2014, kesimpulan yang didapatkan dari hasil wawancara langsung bersama informan mengatakan bahwa pembangunan CPI ini menyampingkan aspek-aspek ekologi dan berpotensi mengganggu ekosistem yang ada. Kamaruddin, Hafied, Muh Akbar:2014). Kehadiran CPI Kota Makassar menimbulkan dampak berupa

pencemaran terhadap lingkungan yang disebabkan karena sampah yang dibuang disembarang. Pencemaran lingkungan tersebut dilakukan oleh oknum para pengunjung serta pedagang. Sumber limbah yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan adalah limbah perhotelan dan perumahan. Atas dasar tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hadirnya proyek CPI kota Makassar mempengaruhi kelestarian lingkungan yang secara tidak langsung mempersulit ekonomi nelayan karena air laut yang ikut tercemar.

2. Pengaruh kerusakan lingkungan terhadap pendapatan Nelayan

Alam jika dirawat dengan baik maka akan memberikan kehidupan yang seimbang. Jika diperlakukan dalam ketidakadilan maka akan rusak dan berdampak besar bagi kehidupan manusia, utamanya dalam konteks menjaga kelestarian lingkungan. Para nelayan yang terdampak langsung dari pembangunan mega proyek CPI Makassar adalah kelompok yang paling dirugikan, baik itu dalam hal ekonomi, lingkungan, sosial dan sebagainya. Pak Arjun yang juga salah satu Nelayan sangat merasa dirugikan atas hadirnya CPI Kota Makassar. Pak Arjun (42 tahun) Mengatakan bahwa :

“sekarang liat meki sepi skalimi, jarangmi lagi turun nelayan, walaupun ada nadapat paling nabawa pulangki dirumahnya kalau 2 atau 3 ekorji nadapat. Bagaimana ka kotormi air, tidak ada ikan tinggal”. (Arjun, 10 Juli 2022).

Berdasarkan dari apa yang diungkapkan informan di atas ini menjelaskan bahwa kelompok yang terkena dampak dari reklamasi CPI Makassar dalam hal ini nelayan sudah tidak memiliki pendapatan yang tetap dan juga yang dulu bisa membantu menghasilkan pendapatan yang bisa dibbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, kini mulai sepi dikarenakan tingkat pencemaran lingkungan yang semakin tinggi yang berujung nelayan sudah tidak sesering dulu untuk turun melaut akibat dari pembangunan reklamasi CPI yang membuat nelayan sulit untuk mendapatkan ikan dikarenakan jarak tempuh yang semakin jauh, harga bahan bakar yang kian mahal, berbanding terbalik dengan pendapatan yang semakin menurun. Pernyataan dari Pak Arjun kemudian diperkuat oleh Dg Nawa, saat dilontarkan pertanyaan yang sama, Dg Nawa (50 tahun) memberikan pernyataan bahwa:

“Sulit sekarang pergi melaut, karena tertutupki akses untuk mencari ikan gara-gara timbunan yang merusak lingkungan”. (Dg Nawa: 10 Juli 2022).

Berdasarkan pendapat dari dua nelayan tersebut menguatkan pernyataan bahwa pengaruh lingkungan berdampak negatif terhadap akses nelayan untuk melaut. Hal tersebut juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Aspan pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proyek reklamasi, ancaman-ancaman terhadap lingkungan akan semakin meluas. Pelaksanaan reklamasi akan membutuhkan sumber material yang berasal dari daratan. Untuk mereklamasi lahan seluas 4000-an Ha tentu saja membutuhkan ber ton-ton timbunan, baik itu tanah urug maupun batu gajah. Pengambilan material disuatu wilayah tentunya akan memberikan dampak ekologis dan sosial pula terhadap wilayah tersebut. (Aspan:2017).

SIMPULAN

Pendekatan Analisis Masalah Sosial Pendekatan analisis dalam masalah sosial pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) yang dilakukan melalui reklamasi Pantai Teluk Makassar menggunakan pendekatan analisis konflik karena masyarakat terdiri atas berbagai kelompok yang berbeda yang berkompetisi untuk menguasai sumberdaya strategis, seperti kekuasaan, finansial, dan otoritas untuk memaksakan sebuah nilai pada masyarakat. Pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Makassar dan Sulawesi Selatan. Pembangunan inipun diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara Wilayah Barat Indonesia (WBI) dan Wilayah Timur Indonesia (WTI) dimana per Triwulan II 2021 kontribusi PDB Nasional masih didominasi Pulau Jawa sebesar 57,92% dan Pulau Sumatera sebesar 21,73% (BPS, 2021). Sedangkan dampak negatif yang dihadirkan pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) berdasarkan aspek sosial dan perspektif ekonomi secara umum adalah menurunnya tingkat perekonomian masyarakat di sekitar kawasan pembangunan (kawasan pesisir) akibat mata pencahariannya terganggu oleh aktivitas pembangunan. Akibatnya, mereka semakin terperangkap dalam kelas sosial yang rendah. Layanan publik yang perlu dikembangkan dalam mendukung Center Point of Indonesia (CPI) dari perspektif ekonomi meliputi: 1) Tersedianya ruang yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas perekonomian, khususnya untuk membangun kawasan strategi bisnis global; 2) Penyediaan sarana prasarana bagi pelaku usaha untuk pemasaran produk; dan 3) Kemudahan izin usaha untuk investor. Pendapatan Nelayan mengalami penurunan yang sangat drastis akibat pembangunan CPI Kota Makassar. Hal ini disebabkan karena rusaknya ekosistem laut akibat dari pembangunan reklamasi CPI yang mengakibatkan semakin jauhnya jarak tempuh nelayan mencari ikan sehingga para nelayan harus ke tengah laut untuk mencari ikan. Hal tersebut tentu mempengaruhi pendapatan nelayan yang menurun secara drastis setelah hadirnya CPI Kota Makassar.

Referensi :

- Ari Probandari. 2017. Cost Effectiviness Analysis Dalam Penentuan Kebijakan Kesehatan: Sekedar Konsep atau Aplikatif ?. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Vol 10. 104-107.
- Amaliah. S. 2020. "Dampak Pembangunan Center Point Of Indonesia Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Panambungan". Skripsi. Makassar. Uin Alauddin Makassar.
- Citra. 2020. "Dinamika Penghidupan Ekonomi Perempuan Pasca Reklamasi CPI di Kota Makassar". Skripsi. Makassar. Uin Alauddin Makassar.
- Jhingan. 2008. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mahi, Ali Kabul. 2017. Perencanaan Pembangunan Daerah, Teori dan Aplikasi. Jakarta: Kencana.
- Mongabay.co.id. 2019. "Tak Ada Lagi Kerang di Pesisir Makassar". <https://www.mongabay.co.id/2019/06/19/tal-ada-lagi-kerang-di-pesisir-makassar/amp/> . 3 Oktober 2020, 20.13.
- Orion. 1997. Pharmacoeconomics Primer and Guide Introduction to Economic Evaluation. Hoesch Marion Rousell Incorporation, Virginia.
- R.A, Rilwanu. 2017." Dampak Reklamasi Lahan Pesisir Kawasan Center Point of Indonesia Kota Makassar Terhadap Pendapatan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Mariso Kota Makassar". Skripsi. Makassar. Universitas Hasanuddin.
- RM.id. 2020. "Walhi Soroti Kerusakan Akibat Proyek Reklamasi CPI di Makassar".

<https://rm.id/kategori-berita/etalase-bisnis>. 19 Desember 2020, 15.30.

Suparni, Ninik. 1994. Pelestarian, Pengelolaan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika.

S.Mulyadi. 2005. Ekonomi Kelautan. Jakarta: PT Raja Persada.

Vogenberg, FR. 2001. Introductions To Applied Pharmacoeconomics. McGraw-Hill Vompanies,USA.